

## Hanya Kejar WTP, Kesejahteraan Dianggap Sepele

SOLO - Belum adanya *policy* atau kebijakan dari pemerintah, memaksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat suatu model untuk memeriksa audit pelaporan keuangan dan audit pelaporan kinerja. Hal itu terkait jumlah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan.

BPK akan merumuskan suatu sistem, bagaimana laporan keuangan yang mendapatkan WTP itu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Bahkan BPK berencana memberikan *reward* kepada institusi yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

"Saat ini regulasinya sedang kita bicarakan. Bahkan saya sedang berfikir untuk memberikan *award* kepada peraih WTP yang punya indikator kesejahteraannya meningkat. Seperti kemiskinannya menurun, penganggurannya menurun, indeks kesenjangan pendapatan menurun dan indeks pembangunan manusia naik. Mana yang terbaik nanti kita kompetisikan antar daerah," papar Ketua BPK RI Harry Azhar Azis usai jadi *keynote speaker* seminar BPK, Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan di Auditorium UNS, Selasa (17/3).

Menurut Harry, cukup banyak lembaga negara, kementerian, atau pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP setelah laporan keuangannya diperiksa.



EDY WIDODORASO

**BERPECI:** Ketua BPK Harry Azhar Azis memberikan paparan tentang pengelolaan keuangan di UNS, kemarin (17/3).

Terbukti, di lembaga negara atau kementerian ada 64 lembaga atau 74 persen mendapatkan opini WTP dari 86 lembaga yang menyerahkan laporan keuangan. Sedangkan untuk pemerintah daerah ada 34 persen atau 153 dari 456 LKPD yang diperiksa pada 2013.

Di sisi lain, pihaknya menyayangkan dari hasil opini WTP itu banyak yang berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat. Terbukti, ketika diukur dengan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Kharis Al-Masyhari menuturkan, masyarakat bisa bertanya

kepada kepala ketika mengetahui laporan keuangan yang mendapat opini WTP dinilai tak menyejahterakan rakyat. Hak bertanya itu wajar, karena rakyat merupakan pemilik negara, sedang presiden

atau kepala daerah adalah orang yang diberi mandat untuk mengatur.

"Kalau pemerintahan tak menyejahterakan rakyat, maka rakyat boleh bertanya. Karena

masyarakat menggunakan pilih untuk memilih presiden atau gubernur, bupati maupun wali kota sudah pasti punya keinginan untuk sejahtera," ungkap Kharis. (edy/wa)